

makalah bayang2

by Ery Supriyadi

Submission date: 18-Jul-2020 11:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 1359032853

File name: MAKALAHbayang-bayangA.doc (100K)

Word count: 4100

Character count: 28582

Bayang-bayang Pembangunan dan Tirai Perencana

Oleh : Ery Supriyadi R.

Abstract

1
There are continuum development phenomenon in Indonesia on reformation era such as increasing agriculture commodity import, weak coordination among government institution, sector, and region, bad cooperative among sector and regional, asymmetric policy, sustainable poverty, width of disparity, neoliberalism scheme to agriculture and rural area, and insitutional conflict. Evaluation and corrective action could be needed for improving frame of reference planner in development formulation and controll. Planning be supported by rationality, felt need, aesthetic, ethic that accompy with objective and universal instrument. Planner should make good formulation and decision of public policy for reduction poverty dan pro-poor pficies, not reverse make poverty. If the planner make strength policy for poverty reduction, so planner role as propulsive power in development; reverse if planner emerge social disaster or distortion, planner exist in absurd although the planner have extrapolation ability dan scientific approach. Rationality, aesthetic, ethic of planner need retrospection in orde to functioned of development planning. Responsibility, honesty, fairness, equity should be internalized in planner value based on trusty.

Keywords : development, planning, propulsive, planner, rationality, ethic, poverty, curtain

PENDAHULUAN

Sejak akhir masa orde baru sampai orde reformasi saat ini, terdapat beberapa fenomena yang layak untuk disimak. Beberapa fenomena pembangunan terus berlanjut dan menyisakan persoalan baru, di antaranya adalah impor komoditas pertanian yang semakin banyak, koordinasi lembaga pemerintah yang lemah antar dan dalam sektoral/wilayah, kerjasama antar daerah lemah, kebijakan yang asimetris, kemiskinan yang berkelanjutan, disparitas yang semakin menganga antar sektor dan antar wilayah, neoliberalisme terhadap pertanian dan perdesaan, konflik antar lembaga di dalam satu kabupaten/kota, konflik antar

lembaga antar kota/kabupaten, konflik lembaga antar wilayah, konflik antar wilayah dan kota. Bahkan mungkin masih lebih banyak lagi yang isu lainnya yang dapat diidentifikasi dan dirangkai secara serial berdasarkan waktu dan kejadiannya.

Bias pembangunan muncul sebagai akibat dari penetapan kebijakan dan rumusan aksi yang diformulasikan oleh para perencana. Ada baiknya kita kembali menengok kebelakang dan melihat kilas balik sejenak mengenai perencanaan pembangunan dan posisi para perencana dalam membangun sosial ekonomi politik daerah yang berkaitan dengan tantangan globalisasi dan kesempatan otonomi daerah. Tindakan evaluasi dan korektif dibutuhkan guna memperbaiki kerangka pikir para perencana dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan strategi, maupun mengendalikan kinerja pembangunan jangka pendek maupun panjang. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sebenarnya kerangka pikir para perencana pembangunan memformulasikan rencana-rencana pembangunan pada setiap sektor, bidang, dan wilayah.

Secara normatif, perencana memiliki kekuatan dalam mempengaruhi publik dengan pengetahuannya (*knowledge is power*). Tindakan perencana didukung oleh daya analisis rasionalitas, rasa, estetika, dan etika yang disertai dengan instrumentasi yang bersifat obyektif, universal dan materialnya. Para perencana dengan kemampuan dan kekuatannya diharapkan mampu mendorong dan menghubungkan relasi-relasi pembangunan guna

merumuskan dan menentukan arah, tujuan dan alat pembangunan dengan argumentatif, visioner, futuristik dan strategik-operasional. Muncul pertanyaan, apakah perencanaan pembangunan yang dibuat tidak rasional atau tidak mempertimbangkan estetika & etika, atau instrumen yang dihasilkan tidak obyektif. Jika pertanyaan ini benar, maka peran perencana pembangunan perlu dipertanyakan keberadaan dan fungsinya. Tulisan ini mencoba menelusuri kegagalan para perencana dalam memformulasikan rencana pembangunan dan akibat yang ditimbulkannya. Kajian dilakukan pada beberapa literatur mengenai pembangunan dan perencanaan.

POTRET PEMBANGUNAN

Secara potensi, Indonesia memiliki keunggulan sumberdaya yang melimpah dan memungkinkan Indonesia mampu meraih kesempatan bagi kemajuan pertanian dan perdesaan, namun pada kenyataannya sulit. Para perencana berargumentasi bahwa hal ini terjadi dilatarbelakangi oleh faktor *leveling off* ; apakah cukup dengan alasan *leveling-off* maka masalah dianggap selesai-dipermaklumkan; apakah dengan jebakan glokalisasi kita harus menerima desakan komoditas dari luar negeri yang menjadikan komoditas asing sebagai produk yang diutamakan bahkan dipromosikan, sebaliknya membiarkan komoditas dalam negeri menjadi asing di rumahnya sendiri. Pencabutan subsidi dan privatisasi, pelaksanaan otonomi daerah yang gamang, serta perilaku elit politik yang egois justru bukan menyelesaikan

masalah, malah menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Kebijakan yang diambil menimbulkan persoalan baru, di antaranya masalah pendidikan, turunnya daya saing dan daya tarik wilayah/kota, rendahnya ketersediaan dan kelayakan prasarana lokal, dan terdegradasinya kualitas lingkungan dan pembangunan.

Sebagai ilustrasi, kasus komoditas pertanian dengan rangkaian preposisi kausalitas di bawah ini perlu dicermati bukan hanya sebagai realitas yang diterima saja, tetapi memerlukan pemecahan dan penyelesaian secara terstruktur-komprehensif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika impor sejumlah jenis komoditas diikuti pula dengan harga impor yang jauh lebih murah dari komoditas lokal, maka komoditas lokal kurang/tidak laku di pasar. Komoditas lokal yang tidak diserap oleh pasar menyebabkan kerugian petani dan diikuti dengan keengganan melakukan proses produksi. Keengganan ini menyebabkan terjadi perubahan pola kehidupan dalam bentuk mata pencaharian dan kesempatan usaha yang bersifat instan, jangka pendek, dan parsial serta alih fungsi lahan. Petani menjual tanahnya, tetapi hasil penjualan kepada kapitalis industri tersebut ternyata tidak memberikan nilai manfaat bagi petani/penduduk di perdesaan. Terjadinya fenomena distorsi dan kegagalan pasar di perdesaan secara simultan berdampak pula pada perkembangan perkotaan. Konversi lahan pertanian produktif kepada industri dengan dalih pengembangan wilayah/kota dan perolehan PAD diberikan ijin oleh para perencana birokrat, padahal secara

penataan ruang (RTRW) dan kelayakan lingkungan tidak memungkinkan atau berlawanan.

Muncul pertanyaan baru, apakah para perencana sadar akan kegagalan tersebut, atau apakah para perencana secara sadar sengaja membuat kegagalan pasar, atau apakah perencana sadar tapi tidak peka/kurang tanggap terhadap signal pasar, apakah perencana berada dalam posisi kurang kritis atau memang perencana hanya sebagai kepanjangan tangan sekelompok orang tertentu saja. Para perencana seharusnya mampu merumuskan dan menetapkan kebijakan publik sedemikian rupa yang pada akhirnya memberikan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat (*pro-poor policies*), bukan sebaliknya malah memberi kontribusi bagi penciptaan kemiskinan. Tulisan ini mencoba mengkaji apa yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan, apa dampaknya jika ternyata terdapat tirai pembangunan dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana mengenalinya .

PERENCANAAN DAN KONSTRUK PEMBANGUNAN

Perencanaan adalah suatu rangkaian proses koordinasi berbagai keputusan menjadi satu kesatuan, untuk dapat dilaksanakan dan berguna berbagai pihak. Sebagai suatu proses, maka pengambilan keputusan tidak hanya sebatas pertimbangan rasional, tetapi validitas, kekomprehensifan, dan konsistensinya. Doktrin rasionalitas perencanaan merupakan perdebatan yang berujung pada pentingnya keterbukaan, kolaborasi dan konsensus guna

membangun perencanaan komunitas dan pola-pola yang dominan berkembang. (Fainstein, and Campbell, 1996).

Dengan berbekal metode perencanaan, perencana secara sadar dan disengaja memecahkan masalah dan memberikan solusi yang dapat diterima. Pendekatan rasional membangun perencanaan secara runtut dilatarbelakangi oleh tatanan nilai teknokratis, alokatif, dan inkremental secara terstruktur dan sekuensial sistematis. Perencanaan terbangun oleh rasionalitas substantif yang sistematis secara kontinum, idiografi empiris merupakan ukuran penting bagi perencanaan. (Branch, 1985).

Kesadaran dan pencerahan merupakan kekuatan dalam membangun pengetahuan perencana dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini berarti bahwa pengetahuan rasional akan membutuhkan kesadaran dan pencerahan yang lebih baik. Masalahnya adalah bahwa suatu masalah dalam teori perencanaan seringkali didudukkan secara naif begitu saja pada penganut paham modernisme, padahal elevasi rasionalitas itu sendiri secara realitas menunjukkan hasil yang mengecewakan dalam proses kelembagaan sosial maupun perencanaan aktual (Etzioni, 1965; Stohr, 1981; Sandercock, 2002).

Fenomena yang diurai di atas, memberikan sinyal bahwa mungkin perlu didudukkan kembali peran perencana sebagai agen perubahan dan kontributor keputusan pembangunan. Ketika perencana mampu mendorong kebijakan secara sistematis untuk mengatasi kemiskinan masyarakat, maka perencana berperan sebagai *propulsive*

power dalam pembangunan; sebaliknya, jika perencana malah menimbulkan *social disaster* atau *distorsi*, maka peran perencana berada dalam *absurd* padahal perencana memiliki kemampuan ekstrapolasi dan pendekatan saintifiknya, rasionalitas, dan estetika, etikanya. Dengan demikian rasionalitas, etika, dan estetika para perencana pada era reformasi saat ini membutuhkan retrospeksi bagi upaya peningkatan peran dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, adil dan berlandaskan moral-etika kebenaran hakiki.

RASIONALITAS DAN ETIKA PERENCANA

Ketajaman rasional instrumental yang dimiliki perencana, memungkinkan perencana tersebut menggunakan daya analisis yang kritisnya guna memberikan alternatif solusi yang bernilai manfaat dan bervisi jauh ke depan dalam kerangka pertumbuhan, stabilitas, pemerataan, ataupun menggerakkan mesin pembangunan. Kekritisian dalam memandang sesuatu secara *a priori*, diselesaikan dengan pendekatan deduksi-induksinya. Untuk mendapatkan proses dan keluaran yang tepat, kerangka pikir *praxis-teoritis* digunakan oleh para perencana sebagai mata pedang (*sword edge*). Dengan kemampuannya ini perencana diharapkan mampu memberikan suatu preskripsi terhadap suatu masalah atau fenomena yang mungkin terjadi, dan memberikan upaya langkah-langkah proses penyelesaian dan rencana pemecahan secara sistemik dan sistematis. Kemampuan fenomenologik perencana

pembangunan dalam memandang sesuatu yang sedang atau telah terjadi secara konstruktif akan menghasilkan suatu *means* dan atau dengan *meansnya* memberikan pemecahan masalah melalui langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur. Dua sisi mata pedang para perencana mencoba kedudukan konteks sebagai basis berpikir dan *cause to stand* perencana.

Jika kita mengacu pada pendapat Emmanuel Kant menyatakan persepsi tanpa konsep adalah buta (*perceptions without concept are blind*), maka perencana adalah buta jika mata pedang rasionalitas instrumentalnya tidak mampu memecahkan masalah atau tidak memberikan pencerahan (*enlightment*) terhadap kondisi yang sedang atau akan dihadapi. Dengan kata lain bahwa daya analisis kritis berbasis rasionalitas dari perencana, seharusnya mampu mempersepsikan sesuatu idea berdasar konsep secara *a priori* atau *a posterior*, *noemena* atau *phenoemena* secara tepat. Hasil ideasi perencana dapat dirumuskan dan diartikulasi, dioperasionalkan secara tepat, jujur, dan benar yang mampu dapat dipahami (Habermas, 1979, Forester, 1989). Ideasi dan perencanaan yang dilakukan dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan kolektif atau kliennya melalui proses dialogis (Friedman, 1987).

Mata pedang perencana yang tajam bermakna bahwa perencana mampu merumuskan kebijakan secara selektif berdasar skala prioritas, menilai kembali tindakan-tindakan yang dirumuskan, dan merancang sistem monitoring evaluasinya. Dengan demikian perencana dituntut untuk

melakukan optimasi *rasionalitas (rationality)*, tatanan nilai (*values*), dan konsensus (*consensual*) secara simultan. Yiftachel (2000) menyatakan bahwa perencanaan merupakan "*dua sisi mata pedang (double-edge sword)*" yang mana pada satu sisi memfasilitasi dan meningkatkan pengembangan rasional dan progresif, namun pada sisi lainnya melawan, menekan, memfragmentasi, maupun mengendalikan kelompok-kelompok tertentu.

Pemahaman tentang situasi, kondisi, ciri, dan kausalitas dari unsur-unsur pembangunan harus dikenali secara mendalam guna mendukung proses diagnosis, analisis, perumusan, perancangan, dan implementasinya. Berbagai strategi, program, dan kebijakan dengan ekspektasi mampu memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dari kepentingan publik, maka ketajaman mata pedang atau daya analitis dan kritis para perencana akan sangat menentukan kemampuan perencana menyibak suatu fenomena, upaya pemecahannya, dan mengungkapkan preskripsi suatu perencanaannya.

Berbasis pada rasionalitas, perencana diharapkan mampu memahami-mengerti (*understand*), memberikan alasan dan argumentasi (*reasoning & argumentative*), menggunakan instrumen yang valid dan tepat, sehingga perencanaan pembangunan berbasis teori dan perspektifnya dapat dengan jelas terlihat dan berdampak positif dalam proses perumusan rencana, implementasi, maupun pengendalian pembangunan, baik aspek keruangan (*spatial*) maupun non spasial. Melalui interaksi komunikatif, para

perencana mampu menyajikan data dan informasi secara benar, akurat, dan mudah dipahami (Forester, 1989; Habermas, 1979) .

Persoalan daya analitis-kritis ditentukan logika inferensi, etika, dan transenden. Perencanaan berhadapan dengan perubahan sosial yang berkembang terus, sehingga idea dan maknanya pun akan berkembang pula; dengan demikian sikap kreatif, inovatif perlu dilandasi oleh kerangka pikir reflektif, kearifan, dan keyakinan. Reflektif berada dalam empiris *realm* inderawi, instrumental, teknologi. Selanjutnya kearifan merupakan empiris *realm* etik, sedangkan keyakinan-rahmah-hikmah merupakan empiris transendental. Hal ini berarti bahwa daya analitis (mata pedang) perencana ditentukan pula mata hati perencana itu sendiri , yaitu etika dan estetika di dalam memahami suatu fenomena dan kemudian merumuskannya kembali, dan membuat preskripsinya dalam bentuk perencanaan yang dapat dioperasionalkan, efisien, dan produktif secara praktis.

Dalam mengangkat dan menyelesaikan masalah publik, perencana bersikap konstruktif, memahami interaksi manusia, mengembangkan kelembagaan, dan mengkaitkan interaksi manusia dengan struktur sosial (*Bryson dan Crosby dalam Mandelbaum, 1996*). Hal ini berarti bahwa konstruk yang dibangun oleh perencana ditentukan oleh kemampuan perencana dalam melihat, merumuskan, menanggapi, mengkritisi, dan mengartikulasikan suatu masalah dengan dimensi interaksi-humanistik. Mata hati dan mata pedang perencana sangat dibutuhkan untuk meningkatkan

kemampuan menggunakan rasio, rasa serta kesadaran dalam melihat, merumuskan, menanggapi, mengkritisi, dan mengartikulasikan suatu masalah. Sisi kognitif perencana melatarbelakangi perilakunya. Perencana diasumsikan tidak memiliki rasa yang akan mempengaruhi suatu model logikanya dan dianggap mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan tidak akan pernah terpengaruhi oleh ketidaksadaran atau tujuan-tujuan yang tersublimasikan. Padahal pada kenyataannya, tradisi rasional menghadapi kritik keterbatasan kognitif dalam logika formulasi rasional komprehensif. (Arrow, 1958; Etzioni, 1968).

Yiftachel dan Huxley (2000) mengusulkan bahwa perencana cenderung berada di luar atau menjauh dari proses pemerintahan, dengan alasan bahwa jika terlalu dekat dengan pemerintahan akan terkontaminasi oleh kerangka pikir yang sebenarnya berseberangan, bisa jadi pemikiran kritis perencana menjadi tumpul; artinya bahwa sangat besar peluangnya perencana terkontaminasi oleh kepentingan pemerintah. Yiftachel dan Huxley juga menyatakan perencana terbayangi oleh kepentingan pemerintah, sehingga bisa jadi menjadikan perencana kurang kritis, mengekor dan tumpul dalam merumuskan rencana, implementasi, maupun pengendaliannya. Dalam konteks lainnya, perencana berdiri pada dua sisi dengan dua kepentingan, yaitu pemenuhan kepentingan profesi dan kepentingan publik melalui intervensinya dalam lembaga pemerintah atau berperan sebagai penyedia dan pengatur kebijakan publik. Dengan demikian, daya analisis-kritis harus

berlandaskan pada rasa dan etika mendampingi rasionalitas perencana guna merumuskan, menuangkan dan mengartikulasikan perencanaannya. Jika tidak, maka dengan otoritasnya perencana sering bertindak regresif dan dominasi yang menyebabkan ketimpangan dan menjadi sisi gelap perencanaan (*dark-side) of planning*.

Bahasa, argumentasi, dan proposal yang diajukan oleh para perencana cenderung mencari peran yang aman atau lebih mementingkan keamanan perencana itu sendiri daripada menemukan solusi masalah secara optimal, *disjointed incrementalism*. Namun demikian, para sisi lainnya, proses perencanaan secara generik merupakan suatu aktivitas prosedural (Faludi, 1973, Friedman, 1987, Forester, 1989, Innes, 1995, Mandelbaum, 1996) yang saat ini cenderung mengarah pada pentingnya *notions* demokrasi, pengambilan keputusan secara kolektif, pemberdayaan komunitas, dan pembatasan intervensi negara. Dari kedua hal ini, sangatlah jelas, bahwa perencana memiliki tirai dalam memainkan perannya dalam pembangunan. Perumusan dan artikulasi perencana dibangun oleh mata, mata hati, dan mata pedangnya para perencana itu sendiri.

RETROSPEKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Mata berkaitan dengan kemampuan melihat, mengamati, menyelidik, menangkap signal yang terjadi atau yang mungkin terjadi. Kemampuan-kemampuan ini akan sangat ditentukan oleh kematangan berpikir, alat analisis yang dimiliki, kepekaan diri, daya analisis-kritis, dan kejelian dalam

memperhatikan secara seksama hubungan antara berbagai realitas dan fenomena yang terjadi. Formulasi dan reformulasi dari suatu fenomena dan rekonstruksi maupun pemecahannya sangat dibutuhkan agar didapatkan suatu pencerahan dari masalah yang dihadapi sekaligus upaya-upaya penyelesaiannya. Mata pedang perencana sebagai alat analisis diharapkan memiliki ketajaman untuk melaksanakan fungsi, jika tidak, berarti mata pedang perencana tumpul, sehingga proses dan hasil perencanaannya tidak bermanfaat, tidak operasional, tidak adil, sia-sia belaka bahkan bisa jadi merupakan bencana sosial.

Ketidaktajaman mata pedang perencana di dalam merumuskan rencana pembangunan, tidak lepas dari kedudukan perencana itu sendiri sebagai agen pembangunan. Jika benar apa yang dikatakan oleh Yiftachel (2000) bahwa perencana telah terkontaminasi dan tumpul oleh kerangka pikir dan kepentingan pemerintah saja, maka fungsi perencana hanya sebatas mengesahkan keinginan kepentingan kelompok elit lewat suatu kebijakan pemerintah, perencana cenderung mengekor atau tumpul dalam merumuskan rencana, implementasi, maupun pengendaliannya. Jika demikian keadaannya, maka mata-mata hati-mata pedang perencana dipertanyakan walaupun tidak mau disebut mandul. Jika keberadaan mata-mata hati-mata hati dipertanyakan, maka kemungkinan pengakuan terhadap perencana akan berkurang atau bahkan mengalami kebuntuan dalam perkembangannya.

Kasus kecenderungan liberalisasi ekonomi di perdesaan dan sektor pertanian, lewat pencabutan subsidi, keterbatasan sarana produksi, infrastruktur dasar (jalan, air, tenaga listrik, dll) maupun produksi yang minim, degradasi lingkungan merupakan realitas yang menjadikan kawasan perdesaan dan pertanian menjadi termarginalkan. Alih-alih efisiensi dan perdagangan bebas, maka pelaku pertanian di perdesaan harus sanggup menghasilkan produksi pertaniannya tanpa adanya bantuan subsidi pupuk atau sarana produksi, padahal sarana dan prasarana tersebut sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil produksi. Para pelaku pertanian dan perdesaan diminta kerelaannya untuk menerima harga sarana produksi yang mahal dan terus naik, sementara harga komoditas yang dihasilkan relatif fluktuatif dibiarkan mengikuti mekanisme pasar bahkan cenderung turun.

Kepedihan petani semakin bertambah dengan hembusan isu talenta kemandirian berproduksi dan berkompetisi dihembuskan sebagai tatanan nilai yang harus dipatuhi oleh para pelaku pertanian dan perdesaan, tanpa ditanya terlebih dahulu kepada para petani-penduduk perdesaan apakah setuju atau tidak, sepakat atau tidak sepakat terhadap keadaan ini. Dalam situasi seperti ini, Indonesia pada tahun 2030-an akan berada kembali seperti era tahun 60-an, yang mana kondisinya mirip, yaitu perencanaan dijadikan alat kaki tangan pemerintah dan elit-elit bisnis yang memaksakan kehendaknya, memanipulasi publik, dan mengendalikan sumber daya atas nama

kesejahteraan. Perspektif perencanaan seperti ini menimbulkan pemikiran dan tindakan progresif, kritik dan radikal sebagai upaya menyeimbangkannya.

Dalam konteks perdesaan sebagai lokal, mengembangkan ekonomi lokal dapat didekati dengan beberapa bentuk strategi di antaranya rentensi bisnis, revitalisasi komersial, bisnis ventura, kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan, pembangunan berbasis tenaga kerja, dan perencanaan komunitas. Setiap bentuk pengembangan ekonomi yang dilakukan memiliki asumsi dasar. Misalnya mengembangkan kawasan perdesaan berbasis perencanaan komunitas (*community planning*) memiliki beberapa asumsi sosial- ekonomi dan politik, yaitu :

1. Adanya ketidakseimbangan sumberdaya dan kekuasaan lingkungan masyarakat
2. Masyarakat memiliki kekuatan baik secara jumlah maupun organisasi
3. Secara wilayah memungkinkan terjadinya perubahan
4. Adanya distribusi sumberdaya yang tidak adil
5. Dibutuhkannya pengkondisian agar efektif, yaitu tersedianya aturan legal, kuatnya koalisi, dan , mendapat dukungan dari sektor publik .

Dengan memperhatikan asumsi ini, nampak terlihat bahwa jika mengembangkan ekonomi perdesaan yang berbasis usaha pertanian dengan pendekatan perencanaan komunitas memiliki tujuan dan arah harus mempunyai nilai-nilai *penghargaan* terhadap pelaku, proses dan hasil pemikiran. Perencana harus memiliki kepedulian yang kuat

dan *jujur* untuk berpihak kepada masyarakat peredesaan. Pemikiran dan tindakan untuk memperbaiki kondisi saat lalu, kini, dan yang akan datang merupakan *kewajiban* yang harus dilakukan secara bersama atau menjadi *kepentingan kolektif* secara bersama-sama. Ada tiga kata penting yang perlu disadari, digarisbawahi, dicamkan secara mendalam dan dimasukkan dalam setiap rangkaian proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian/perdesaan, yaitu *penghargaan, kejujuran, dan kewajiban* dalam konteks kepentingan kolektif.

Penghargaan bermakna bahwa segala pikiran dan tindakan dengan latarbelakang nilai tertentu akan menghasilkan suatu yang berharga, layak dihargai, patut diberikan penghargaan, dan memiliki harga. Hal ini berarti bahwa segala pemikiran dan tindakan yang dilakukan perencana dengan kemampuan mata-mata pedang-mata hatinya haruslah menelorkan suatu gagasan, karya, dan tindakan yang berharga. Dengan gagasan, karya, dan tindakan yang berharga maka perencana dihargai dan mendapatkan penghargaan sebagai wujud profesinya. Tentunya hal ini akan paradoks jika ternyata yang dilakukan dan dihasilkan para perencana tidak berharga, atau perencana mendapat kecaman dari hasil gagasan, karya, dan tindakan perencanaannya yang dilakukannya, bahkan lebih jauh lagi perencanaannya tidak dihargai. Brook (2002) dalam konteks reformasi sosial dan sistem politik lokal, menyatakan bahwa perencana menjadi mandul (*impoten*) dan perencanaan tidak dapat efektif jika perencana tidak

mengerti, tidak tahu bagaimana menggunakan dan bekerja dalam sistem lokal. Pernyataan ini merupakan peringatan penting dan kritik bahwa perencana wajib memiliki rasa, mampu menginterpretasikan secara jitu fenomena yang terjadi, mengerti secara tepat, merespon secara arif, dan meaktualisasikan gagasan, karya, dan tindakannya melalui perencanaan secara jujur dan bertanggungjawab atas dasar kepentingan publik.

Dalam konteks kejujuran, maka perencana selayaknya berlandaskan pada kejujuran berpikir dan bertindak. Moralitas kejujuran, keterbukaan, kesadaran diri, dan kebertanggungjawaban dari apa yang dirancang, proses, dan hasilnya merupakan prinsip dasar yang harus dipegang oleh perencana sebagai pribadi ataupun profesi. Hal ini berarti bahwa etika deskriptif, normatif dan integratif menjadi landasan dan dapat terlihat dengan jelas dari runtutan proses dan tahapan perencanaan yang dilakukan bagi pembangunan. Mungkin kita harus berani membangun referensi kebijakan-kebijakan yang lebih memahami konstruksi-konstruksi secara natural dan jujur atau juga berani menyatakan secara jujur bahwa ada ketidaknetralan dari globalisasi.

Kewajiban perencana melingkupi rangkaian kegiatan menelorkan gagasan, berkarya, dan bertindak untuk kepentingan kolektif. Perencana diisyaratkan mampu memahami konteks, mengidentifikasi masalah, menyatakan pendapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang (teknik, personal, sumberdaya, media, peraturan,

administrasi, dll), melakukan peninjauan kepada berbagai pihak terkait, meninjau kelayakan administratif-politik-publik, menetapkan tindakan dengan tetap memperhatikan batasan dan kendala yang dihadapi, dan selanjutnya mengevaluasi kembali hasil tersebut dengan konteks dan masalah yang dihadapi. Dalam model etika normatif, perencana berkewajiban menyatakan pendapat dengan mempertimbangkan dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin serta menunjukkan kecenderungan *magnitude*, maupun deontologinya. Di samping itu, perencana berkewajiban untuk melakukan kontraktual, komunikasi, negosiasi dalam membuat suatu keputusan atas dasar etika pribadi, kode etik profesi, lingkungan personal, dan lingkungan profesional. Dengan demikian etika merupakan suatu kewajiban, dan dengan etika perencanaan ini, maka perencana berkewajiban mencerahkan publik, memberikan alternatif solusi, dan secara konsisten merespon serta bertanggungjawab terhadap berbagai situasi dan kondisi yang terjadi.

Jika kita menggunakan pendekatan logika deontik, maka dapat dinyatakan bahwa jika perencana menganggap pengembangan ekonomi lokal melalui perencanaan komunitas perdesaan bagi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraannya adalah wajib, maka peningkatan kesejahteraan petani, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kawasan perdesaan adalah wajib dilakukan. peningkatan kesejahteraan petani, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kawasan perdesaan tidak

dilakukan secara niscaya, dan harus mungkin dapat dilakukan. Phrase ini menunjukkan betapa pentingnya peran perencana bagi masyarakat, dan betapa pentingnya etika perencana dalam melakukan perencanaannya dengan memperhatikan etika, moral, dan nilai-nilai yang terkait dengan substansinya, terutama sekali mengenai nasib para kaum dhuafa dan petani di kawasan perdesaan ataupun keberadaan sektor pertanian.

Daftar Pustaka.

- Agranoff, Robert and Michael Mc Guire. 2003. **Collaborative public management: new strategies for local government**. Georgetown University Press. Washington, DC.
- 7 Alexander, Ernest. 1996. **After Rationality : Toward a Contingency Theory for Planning**. In Mandelbaum, Seymour J, and Mazza, Luigi, and Burchell, Robert W., **Explorations in Planning Theory**. Center For Urban Policy Research. Rutgers, The State University of New Jersey. New Brunswick, New Jersey
- Allmendinger, Philip. 2001. **Planning in Postmodern Times**. Routledge. London-New York.
- Beauregard, Robert. 1993. **Constituting Economic Development : A Theoretical Perspective In Theories of Regional Development In Theories of local Economic Development**. Perspectives From Across the Disciplines. Edited by Richard D. Birmingham and Robert Mier Sage Publications, Inc. USA-London-New Delhi.
- Branch, Melville C. 1985. **Comprehensive City Planning. : Introduction and Explanation**. Planner Press APA, USA.
- 8 Bryson, John M and Crosby, Barbara C. 1996. **Planning and the Design and Use of Forums, Arenas, and Courts**. In Mandelbaum, Seymour J, and Mazza, Luigi, and Burchell, Robert W., 1996. **Explorations in Planning Theory**. Center For Urban Policy Research. Rutgers, The State University of New Jersey. New Brunswick, New Jersey.
- Burke, Edmund M. 1979. **A Participatory Approach to Urban Planning**. Human Sciences Press. New York London.

8 Chaskin, Robert J. 2001. **Building Community Capacity. A Definition Framework and Case Studies from a Comprehensive Community Initiative.** Sae Publication. Urban Affair Review. Vol x36 (3) January 2001. p 291-323.

Conyers, Diana and Hills, Peter. **An Introduction to Development Planning in the Third World.** John Wiley and Sons. Chichester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore.

3 Dunford Michael. 2003. **Theorizing Regional Economic Performance and the Changing Territorial Division of Labour.** Edited by Roper Stephen. Regional Studies Vol. 37.8, pp 839-854, November 2003.

12 Fainstein, Susan S. and Fainstein, Norman. 1996. **City Planning and political Values : An Updated View.** In Campbell, Scott and Fainstein, Susan S.(Ed.) 1996. **Reading in Planning Theory.** Blackwell Publisher. Oxford. UK.

4 Ferraro, Giovanni. 1996. **Planning as creative Interpretation.** In **Mandelbaum, Seymour J, and Mazza, Luigi, and Burchell, Robert W., 1996. Explorations in Planning Theory.** Center For Urban Policy Research. Rutgers, The State University of New Jersey. New Brunswick, New Jersey.

9 Forester, J. 1989. **Planning in the face of Power.** University of California Press, Berkeley.

Friedman, J. 1987. **Planning in the Public Domain.** Princeton University Press. Princeton, NJ.

Goonewardena, K. and Katharine N. Ramshi. 2004. **The Desire Civil Society. A Contribution to the Critique of a Bourgeois Category.** Sage Publication. Vol 3(2), p 117-149

Guba, Egon G. 1990. **The Paradigma Dialog,** Eds by Guba, Egon G. Sage Publications, New Delhi.

4 Healey, Pats. 1996. **The Communicative Work od development Plans.** In **Mandelbaum, Seymour J, and Mazza, Luigi, and Burchell, Robert W., 1996. Explorations in Planning Theory.** Center For Urban Policy Research. Rutgers, The State University of New Jersey. New Brunswick, New Jersey.

11 _____ 2000. **Planning Theory and Urban and Regional Dynamic : A Comment on Yiftachel and Huxley International Journal of urban and Regional research.** Volume 24, 4 Desember 2000.

4 Hendler, Sue. 1996. **On the Use of Models in Planning Ethics.** In **Mandelbaum, Seymour J, and Mazza, Luigi, and Burchell, Robert W., 1996. Explorations in Planning Theory.** Center For Urban Policy Research. Rutgers, The State University of New Jersey. New Brunswick, New Jersey.

- Innes, Yudith E. 2004. **Consensus Building : Clarifications for the Critics.** Sage Publication. Vol 3(1), p 5-20
- Klosterman, Richard E. 1996. **Arguments for and Against Planning.** In Campbell, Scott and Fainstein, Susan S.(Ed.) 1996. **Reading in Planning Theory.** Blackwell Publisher. Oxford. UK.
- Nickum, James E. 1994. **Sustainable Institution for Sustainable Resource Use. In Globalization, Democratization, Decentralization, and Sustainable Development.** Regional Development Dialogue(RDD) Vol. 15, No. 1 , Summer 1994.
- Ormerod, Paul. 2000. **Butterfly Economics. A New General Theory of Social and Economic Behaviour.** Patheon Books, New York.
- Perry, David C. 1994. **Planning and the City : The Turbulent Practice.** *Planning theory 10-11.* 1994. SUNY at Buffalo.
- 3 Rogerson, Christian M. 1994. **Democracy, Reconstruction, and Changing Local and Regional Economic Planning in South Africa. In Globalization, Democratization, Decentralization, and Sustainable Development.** Regional Development Dialogue(RDD) Vol. 15, No. 1 , Summer 1994.
- 14 Roo, Gert De. 2003. **Environmental Planning in the Netherlands : Too Good to be True. From Command-and Control Planning to Shared Governance.** Ashgate Publishing Company. USA.
- 3 Sandercock, Leonie. 1998. **Towards Cosmopolis: Planning for Multicultural Cities.** John Wiley & Sons. Toronto.
- 10 Sanyal, Bish. 1994. **Ideas and Institutions : Why the Alternative Development Paradigm Withered Away. In Globalization, Democratization, Decentralization, and Sustainable Development.** Regional Development Dialogue(RDD) Vol. 15, No. 1 , Summer 1994.
- 13 Thissen, W.A.H. 2001. **Planning and decision-making from an actor perspective : Some implications for practice of evaluation in Recent Development in Evaluation in spatial, infrastructure and environmental planning.** Eds by Vooghd, Henk Geo Press. Groningen, Netherlands
- Yiftachel and Huxley, Margo. 2000. **Debate and Development. Debating Dominance and Relevance : Notes on the 'Communicative Turn' in Planning Theory.** International Journal of urban and Regional research. Volume 14, 4 Desember 2000.

makalah bayang2

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.ikopin.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	3%
3	journals.itb.ac.id Internet Source	2%
4	wvs.princeton.edu Internet Source	2%
5	s3.amazonaws.com Internet Source	1%
6	www.triplehelixconference.org Internet Source	1%
7	Submitted to University of Newcastle upon Tyne Student Paper	1%
8	escholarship.org Internet Source	1%
9	veprints.unica.it Internet Source	1%

web.mit.edu

10	Internet Source	1%
11	www.idunn.no Internet Source	1%
12	www.newsletter.stadt2030.de Internet Source	1%
13	www.nido.nu Internet Source	1%
14	Submitted to Cardiff University Student Paper	1%
15	ftp.cs.rutgers.edu Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off